BAB II

KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang beberapa pendekatan teoritik yang nantinya akan menunjang dalam analisis data. Beberapa teoritik tersebut adalah teori konflik, elit politik dan faksionalisme partai. Teori konflik digunakan dalam penelitian ini dikarenakan fokusnya terletak pada konflik yang terjadi di tubuh partai PPP. Sedangkan elit politik digunakan dalam penelitian ini karena aktor yang berkonflik di partai PPP merupakan para elit di partai PPP. Dan pendekatan faksionalisme partai adalah untuk menganalisis data tentang kubu-kubu yang ada di DPW PPP Jawa Timur.

A. Teori Konflik

Konflik dalam ilmu politik seringkali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung pengertian "benturan", seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Sehingga, ada konflik yang berwujud kekerasan dan ada pula konflik yang tak berwujud kekerasan[23].

Konflik adalah suatu bentuk interaksi sosial dimana seseorang individu atau kelompok dalam mencapai tujuan maka individu atau kelompok akan mengalami kehancuran, sedang yang lain menilai bahwa konflik merupakan

[23]Ramalan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* ,(Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana, 1999), hal:75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah proses sosial dimana individu-individu atau kelompok individu berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan[24]. Menurut Soerjono Soekanto, "Konflik adalah proses sosialisasi dimana orang perorang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan".

Menurut Coser, konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan mengenai dengan status, kuasa, sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud memperoleh barang yang diinginkan melainkan juga memojokkan, merugikan atau bahkan menghancurkan pihak lawan. Perselisihan atau konflik dapat berlangsung antar individu-individu, kumpulan-kumpulan atau antar individu dengan kumpulan. Bagaimanapun konflik baik yang bersifat antara kelompok maupun intra kelompok, selalu ada ditempat hidup orang bersama. Konflik disebut unsur interaksi yang penting, dan tidak sama sekali tidak boleh dikatakan selalu tidak baik atau memecah belah dan merusak, justru konflik dapat menyumbangkan banyak pada kelestarian kelompok dan memepererat hubungan antar anggotanya.

Setiap sistem politik terutama sistem politik demokrasi penuh kompetisi dan sangat dimungkinkan adanya perbedaan kepentingan, rivalitas, dan konflik-konflik. Hal ini merupakan realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat modern, karena masing-masing mempunyai *interest* atau tujuan yang mungkin saling bertentangan. Maka konflik dalam ilmu politik sering diterjemakhkan

[24]Slamet Santosa, *Dinamika Kelompok* (Jakarta: Bumi Aksara: 1999), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai oposisi, interaksi yang antagonistis atau pertentangan, benturan antar macam-macam paham, perselisihan kurang mufakat, pergesekan, perkelahian, perlawanan dengan senjata dan perang.

1. Penyebab Konflik

Timbulnya konflik kepentingan menurut Dahrendorf[25], berawal dari orang-orang yang tinggal bersama dan meletakkan dasar-dasar bagi bentuk-bentuk organisasi sosial, dimana terdapat posisi-posisi dalam hal mana para penghuni mempunyai kekuasaan memerintah dalam konteks-konteks tertentu dan menguasai posisi-posisi tertentu, serta terdapat posisi lain dimana para penghuni menjadi sasaran perintah demikian itu. Perbedaan ini berhubungan baik sekali dengan ketidak seimbangan distribusi kekuasaan yang melahirkan konflik kepentingan itu.

Dahrendorf melihat hubungan yang erat antara konflik dengan perubahan dalam hal ini sejalan dengan pendapat Lewis Coser bahwa seluruh aktifitas, inovasi dan perkembangan dalam kehidupan kelompoknya dan masyarakatnya disebabkan terjadinya konflik antara kelompok dan kelompok, individu dan individu serta antara emosi dan emosi didalam diri individu. Dahrendorf juga menjelaskan bahwa konflik sosial mempunyai sumber struktur, yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur organisasi sosial. Dengan kata lain, konflik antar kelompok dapat dilihat dari sudut konflik tentang keabsahan kekuasaan yang ada.

[25]Pluit Dean J dan Rubbin Jeffry, *Teori Konflik Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Maurice Duverger, penyebab terjadinya konflik adalah: (1) Sebab-sebab individual. Sebab-sebab individual seperti kecendrungan berkompetisi atau selalu tidak puas terhadap pekerjaan orang lain dapat menyebabkan orang yang mempunyai ciri-ciri seperti ini selalu terlibat dalam konflik dengan orang lain dimanapun berada. (2) Sebab-sebab kolektif, adalah penyebab konflik yang terbentuk oleh kelompok sebagai hasil dari interaksi sosial antara anggota-anggota kelompok. Penyebab konflik ini dihasilkan oleh adanya tantangan dan masalah yang berasal dari luar yang dianggap mengancam kelompoknya.

2. Bentuk-bentuk Konflik

Dalam teori konflik terdapat beberapa bentuk konflik dan tertuju pada permasalahan konflik, seperti yang dikemukakan oleh para ilmuan barat, masalah konflik tidak mengenal demokratisasi maupun diktatorisasi dan bersifat universal.

Menurut teori Fisher, pola konflik dibagi ke dalam tiga bentuk: (1) Konflik laten yaitu konflik yang sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat kepermukaan sehingga dapat ditangani secara efektif. (2) Konflik manifest atau terbuka yaitu konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan bebagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai macam efeknya. (3) Sedangkan konflik permukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sesuatu yang dapat diatasi dengan menggunakan komunikasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Maurice Duverger ada tiga bentuk konflik yang berkaitan dengan kekuasaan atau politik antara lain: (1) Konflik yang sama sekali tidak mempunyai dasar prinsipil, bentuk konflik ini berhubungan langsung dengan masalah praktis bukan dengan masalah ideologi yang dilakukan baik oleh individu maupun golongan atau kelompok. (2) Konflik yang lebih menitik beratkan kepada perbedaan pandangan baik individual maupun kelompok yang menyangkut dengan masalah partai politik atau yang berhubungan dengan kepentingan partai politik, masyarakat yang dianggap mewakili rakyat. (3) Konflik yang menitik beratkan kepada permasalahan perbedaan ideologi, masing-masing memperjuangkan ideologi partainya yang semuanya merasa benar.

Menurut Coser ada dua bentuk dasar konflik yaitu konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis adalah konflik yang mempunyai sumber konkrit atau bersifat material, seperti perebutan wilayah atau kekuasaan, dan konflik ini bisa teratasi kalau diperoleh dengan merebut tanpa perkelahian dan pertikaian[26].

Konflik non-realistis adalah konflik yang didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, seperti konflik antar agama dan organisasi-organisasi masyarakat, dan konflik non-realistis adalah satu cara mempertegas atau menurunkan ketegangan suatu kelompok. Dalam sejarah Indonesia baik pada masa kolonial maupun pada masa pasca kemerdekaan konflik ini dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu: (1)

[26]Lewis Coser, *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada: 2009), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antar negara atau antara aparat negara dengan warga negara baik secara individual maupun kelompok, seperti pemberontakan bersenjata yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI. (2) Konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antar kelompok-kelompok diberbagai lokasi biasanya dilandasi oleh suatu sentimen subyektif yang sangat mendalam yang diyakini warganya seperti sentimen kesukuan atau sentimen organisasi.

3. Dampak Konflik

Menurut Fisher suatu konflik tidak selalu berdampak negatif, tapi ada kalanya konflik juga memiliki dampak positif. Dampak positif dari suatu konflik adalah sebagai berikut: (1) Konflik dapat memperjelas berbagai aspek kehidupan yang masih belum tuntas. (2) Adanya konflik menimbulkan penyesuaian kembali norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. (3) Konflik dapat meningkatkan solidaritas diantara angota kelompok. (4) Konflik dapat mengurangi rasa ketergantungan terhadap individu atau kelompok. Sedangkan dampak negatif dari suatu konflik adalah sebagai berikut: (1) Keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok. (2) Kerusakan harta benda bahkan dalam tingkatan konflik yang lebih tinggi dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. (3) Berubahnya kepribadian para individu atau anggota kelompok. (2) Munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Konsep Elit Politik

Dalam pengertian yang umum elit menunjuk pada sekelompok orang orang yang ada dalam masyarakat dan menempati kedudukan tinggi. Dalam pengertian khusus dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan minoritas yang memegang kekuasaan.

Dalam studi sosial golongan minoritas yang berada pada posisi atas yang secara fungsional dapat berkuasa dan menentukan dikenal dengan elit. Elite adalah suatu minoritas pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial.

Elit politik yang dimaksud adalah individu atau kelompok elit yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik. Suzanne Keller mengelompokkan ahli yang mengkaji elit politik ke dalam dua golongan. Pertama, ahli yang beranggapan bahwa golongan elite itu adalah tunggal yang biasa disebut elit politik (Aristoteles, Gaetano Mosca dan Pareto). Kedua, ahli yang beranggapan bahwa ada sejumlah kaum elit yang berkoeksistensi, berbagi kekuasaan, tanggung jawab, dan hak-hak atau imbalan. (ahlinya adalah Saint Simon, Karl Mainnheim, dan Raymond Aron).

Menurut Aristoteles, elit adalah sejumlah kecil individu yang memikul semua atau hampir semua tanggung jawab kemasyarakatan. Definisi elit yang dikemukakan oleh Aristoteles merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan Plato tentang dalil inti teori demokrasi elitis klasik bahwa di setiap masyarakat, suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar. Konsep teoritis yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles kemudian diperluas kajiannya oleh dua sosiolog politik Italias, yakni Vilpredo Pareto dan Gaetano Mosca[27].

Pareto menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan politik. Kelompok kessil itu disebut dengan elit, yang mampu menjangkau pusat kekuasaan. Elit adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya elit berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya. Pareto lebih lanjut membagi masyarakat dalam dua kelas, yaitu pertama elit yang memerintah dan elit yang tidak memerintah. Kedua, lapisan rendah (non- elite) kajian tentang elit politik lebih jauh dilakukan oleh Mosca yang mengembangkan teori elit politik. Menurut Mosca, dalam semua masyarakat, mulai dari yang paling giat mengembangkan diri serta mencapai fajar peradaban, hingga pada masyarakt yang paling maju dan kuat selalu muncul dua kelas, yakni kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah, biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan. Kelas yang diperintah jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh kelas yang memerintah[28].

Pareto dan Mosca mendefinisikan elit sebagai kelas penguasa yang secara efektif memonopoli pos-pos kunci dalam masyarakat. Definisi ini kemduain

[27]Ibid., 34.
[28]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didukung oleh Robert Michel yang berkeyakinan bahwa ”hukum besi oligarki” tak terelakkan. Dalam organisasi apapun, selalu ada kelompok kecil yang kuat, dominan dan mampu mendiktekan kepentingannya sendiri. Sebaliknya, Lasswell berpendapat bahwa elit sebenarnya bersifat pluralistik. Sosoknya tersebar (tidak berupa sosok tunggal), orangnya sendiri beganti-ganti pada setiap tahapan fungsional dalam proses pembuatan keputusan, dan perannya pun bisa naik turun tergantung situasinya. Bagi Lasswell, situasi itu yang lebih penting, dalam situasi peran elit tidak terlalu menonjol dan status elit bisa melekat kepada siapa saja yang kebetuan punya peran penting[29].

Pandangan yang lebih luwes dikemukakan oleh Dwaine Marvick. Menurutnya ada dua tradisi akademik tentang elit. Pertama, dalam tradisi yang lebih tua, elit diperlukan sebagai sosok khusus yang menjalankan misi historis, memenuhi kebutuhan mendesak, melahirkan bakat-bakat unggul, atau menampilkan kualitas tersendiri. Elit dipandang sebagai kelompok pencipta tatanan yang kemudian dianut oleh semua pihak. Kedua, dalam tradisi yang lebih baru, elit dilihat sebagai kelompok, baik kelompok yang menghimpun yang menghimpun para petinggi pemerintahan atau penguasa di berbagai sektor dan tempat. Pengertian elit dipadankan dengan pemimpin, pembuat keputusan, atau pihak berpengaruh yang selalu menjadi figur sentral.

Field dan Higley menyederhanakan dengan mengemukakan bahwa elit adalah orang-orang yang memiliki posisi kunci, yang secara awam dipandang sebagai sebuah kelompok. Merekalah yang membuat kebijakan umum, yang satu

[29]Ibid., 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama lain melakukan koordinasi untuk menonjolkan perannya. Menurut Marvick, meskipun elit sering dipandang sebagai satu kelompok yang terpadu, tetapi sesungguhnya di antara anggota-anggota elit itu sendiri, apa lagi dengan elit yang lain sering bersaing dan berbeda kepentingan. Persaingan dan perbedaan kepentingan antar elit itu kerap kali terjadi dalam perebutan kekuasaan atau sirkulasi elit.

Pandangan ilmuwan sosial di atas menunjukkan bahwa elit memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Pengaruh yang memiliki/bersumber dari penghargaan masyarakat terhadap kelebihan elit yang dikatakan sebagai sumber kekuasaan. Menurut Miriam Budiardjo, sumber-sumber kekuasaan itu bisa berupa keududukan, status kekayaan, kepercayaan, agama, kekerabatan, kepandaian dan keterampilan. Pendapat senda juga diungkapkan oleh Charles F. Andrain[30] yang menyebutnya sebagai sumber daya kekuasaan, yakni: sumber daya fisik, ekonomi, normatif, personal dan keahlian.

C. Faksionalisme Partai

Dewasa ini masalah kelompok-kelompok dan faksi-faksi di dalam partai telah menjadi poin penting. Karena pentingnya masalah ini secara intrinsik dan bagaimana masalah ini telah mengambil bentuk yang sangat tajam, maka masalah ini harus didiskusikan dengan kejelasan yang sempurna. Namun, cukup sering masalah ini dikedepankan dengan cara yang keliru.

[30]Ibid., 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Definisi Faksionalisme

Diterapkan istilah 'faksi' kelompok dengan karakteristik yang sangat berbeda. Dalam kebanyakan kasus, konteks dan ruang lingkup penelitian sebagian besar mempengaruhi definisi dari faksionalisme. Faksi sebagai kombinasi atau pengelompokan pemilih dan pemimpin politik yang bersatu di waktu tertentu dalam mendukung calon. Selanjutnya, definisi dari faksi cenderung dikaitkan dengan identifikasi kekuatan organisasi. Sebuah analisis rinci dari faksionalisme partai dipelopori oleh Raphael Zariski dan itu adalah analisis konseptual pertama yang menawarkan hipotesis untuk menjelaskan politik faksi menggunakan kerangka komparatif. Zariski mengembangkan berbagai pendekatan untuk menganalisis kelompok intra-partai yang dilabel sebagai faksi dari fungsi struktur dan dampak kelompok politik tersebut. Zariski mendefinisikan faksi sebagai: setiap intra-partai kombinasi, atau pengelompokan yang anggotanya berbagi rasa identitas umum dan tujuan umum dan diatur untuk bertindak secara kolektif sebagai blok yang berbeda dalam partai untuk mencapai tujuan mereka[31].

Pemahaman Zariski tentang faksi jelas menyiratkan tingkat daya tahan tertentu dari organisasi. Dia menunjukkan kebutuhan untuk faksi memiliki identitas umum dan menjadi terorganisir secara kolektif. Kecenderungan ini mengilhami definisi ini lebih berlaku untuk negara-negara dengan sistem politik yang lebih mapan dan pihak yang dilembagakan.

[31]Bima Arya Sugiarto, "Beyond Formal Politics: Party Factionalism and Leadership In Post-Authoritarian Indonesia" (Thesis tidak diterbitkan, Department Of Political And Social Change Research School Of Pacific And Asian Studies The Australian National University, 2006) 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penafsiran sempit tentang faksi diperkenalkan oleh Nathan yang cenderung mengasosiasikan faksi dengan ikatan patron-klien terlepas dari tingkat organisasi. Menggambar dari analisis pengelompokan dalam Partai Komunis China, faksi menurut Nathan dapat dianggap sebagai "jaringan pribadi pemimpin individu yang beroperasi pada dasar hubungan klientelis untuk tujuan politik mereka". Meskipun masalah organisasi, sarjana lain telah mencoba untuk fokus pada dasar kelompok yang terbagi.

Perdebatan lain yang berkaitan dengan aspek-aspek motivasi dari faksi partai adalah apakah faksi dasarnya kelompok ideologis. Pembahasan mengenai faktor ideologis di faksi formasi dasarnya berasal dari gagasan bahwa faksi mungkin memiliki berbagai tujuan, kepentingan daerah atau kelompok, pengaruh pada strategi partai dan dari pemerintah, dan promosi seperangkat nilai diskrit. Dalam banyak kasus, ideologi faksionalisme menjadi aspek penting dalam pembentukan identitas partai. Ideologi konflik mencerminkan perbedaan pendapat tentang nilai yang ditegakkan. Magone menyatakan bahwa kontroversi ideologi sering didasarkan pada desain politik untuk organisasi internal partai dan sistem politik di masa depan. Beller dan Belloni hati-hati menentukan faksi sebagai: setiap kelompok yang relatif terorganisir dan yang bersaing dengan rival kekuasaan keuntungan dalam kelompok yang lebih besar dari yang merupakan bagian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Konsep Pokok Faksionalisme

Ada tiga jenis faksi yang kaitannya dengan struktur[32]: (1)geng faksi atau kecenderungan; (2)faksi klien-kelompok pribadi; dan (3)melembagakan atau faksi organisasi. Jenis pertama ditandai dengan ideologi umum, kebijakan, materi atau minat pribadi dalam mengejar tujuan mereka. Dan ini merupakan jenis faksi yang tidak resmi terorganisir. Ini sangat informal dan tidak harus dianggap sebagai bagian resmi dari organisasi. Tipe ini sering digambarkan menggunakan istilah seperti sayap partai, arus, kecenderungan atau faksi informal.

Tipe kedua, faksi pribadi atau klien-kelompok memiliki bentuk yang lebih konkret dari jenis yang pertama. Pengelompokan ini secara pribadi merekrut anggota dan mempertahankan ikatan antara pemimpin dan pengikut. Tipe ini dapat dibagi lagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah faksi yang sangat pribadi direkrut secara pribadi dan berskala kecil, dan sering dalam konteks tradisional. Yang kedua adalah faksi pribadi direkrut pada yang lebih umum dengan skala yang lebih besar yang sering bekerja sebagai mesin partai atau jaringan dalam partai bekerja untuk memperkuat dukungan elektoral partai. Dibandingkan dengan faksi tradisional-pribadi, jenis-jenis faksi kedua ini yang dianggap sebagai yang lebih dimodernisasi karena mereka merupakan sejumlah besar anggota.

[32]Patrick Köllner and Basedau, "Factionalism in Political Parties:
An Analytical Framework for Comparative Studies", terj, Research Program Legitimacy and Efficiency of Political Systems German Overseas Institute (DÜI), 2005, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara konseptual, Françoise Boucek dalam "Rethinking Factionalism" membedakan 'tiga wajah' faksionalisme, yaitu kooperatif, kompetitif, dan degeneratif. Tipologi ini merujuk pada perilaku aktor-aktor di dalam partai, yang tidak sekadar meliputi proses dinamis pembelahan sub-sub kelompok di dalam partai, namun juga proses perubahan yang multi-faceted yang terjadi sebagai respon terhadap berbagai insentif. Faksionalisme kooperatif muncul kalau ada kapasitas agregatif partai untuk memfasilitasi kerjasama antar berbagai kelompok di dalam partai. Berbagai faksi atas dasar pengelompokan militansi ideologis, primordial, ketokohan, dan lain sebagainya dapat mendinamisasi partai jika ada kepemimpinan yang berorientasi pada *consensus-building*. Sebaliknya, wajah faksionalisme kompetitif akan tampak ketika perbedaan pendapat, konflik kepentingan, maupun perebutan jabatan-jabatan strategis di partai menghadirkan gaya politik sentrifugal dan fragmentasi yang semakin mengeraskan perkubuan di dalam partai. Jika tidak dikelola dengan baik, energi kompetisi faksional ini dapat mendestabilisasi partai dan membuat kebuntuan pembuatan keputusan (*decisional stalemate*) di partai. Yang paling serius adalah faksionalisme yang degeneratif. Ini terjadi ketika muncul banyak faksi yang berorientasi pada kepentingan kelompoknya semata dan beroperasi sebagai kanal untuk penyaluran patronase. Privatisasi faksi dan insentif ini tentu mendorong konflik internal yang parah dan dapat menjerumuskan partai pada perpecahan.

Jenis ketiga, faksi dilembagakan atau organisasi, adalah jenis yang paling formal. Jenis ini memiliki mekanisme dalam merekrut anggota, dan memiliki aturan dan prosedur formal daripada mengandalkan ikatan pribadi rekrutmen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemimpin-pengikut. Indikator yang sering berlaku untuk jenis golongan ini mencakup memiliki pejabat, yang tunduk pada aturan formal dan mengikuti prosedur biasa, memiliki nama atau simbol non-pribadi untuk kelompok.

3. Penyebab Faksionalisme

Faksionalisasi kepartaian sejatinya merupakan hal umum. Biasanya faksionalisasi menjadi masalah serius ketika demokrasi internal dan institutionalisasi partai tidak berjalan sehingga terjadi personifikasi kekuasaan. Dalam konteks internal parpol, penyebab faksionalisme diantaranya kuat dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama yaitu ideologi, kedua kepemimpinan partai, dan ketiga karakter patronase. Pertama dalam konteks ideologi, parpol dengan basis ideologi yang kokoh biasanya memiliki daya tahan yang kuat terhadap perpecahan internal. Sebaliknya, semakin pragmatis karakter partai, semakin rentan pula lah partai tersebut terhadap perpecahan. Kedua, parpol dengan tradisi kepemimpinan yang baik juga lebih siap dalam mengelola benturan politik internal dibandingkan parpol dengan corak kepemimpinan karismatik atau kepemimpinan instan, karena sebagian besar penyebab faksionalisme terkait dengan persaingan dalam merebut kendali politik partai.

Ketiga, faktor internal lain yang sangat memperngaruhi pengelolaan faksionalisme adalah karakter patronase di dalam partai. Model patronase politik tradisional dimana hubungan antara patron politik dengan kader-kadernya yang sangat bersifat informal dan personal berpotensi besar mengancam struktur legal formal partai. Karena loyalitas personal justru menjadi lebih menentukan daripada mekanisme formal. Hal ini terlihat dari loyalitas personal terhadap patron politik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih kuat daripada loyalitas terhadap *platform* perjuangan partai. Namun sebaliknya dengan model patronase politik yang lebih modern, hubungan patron politik dan kadernya lebih bersifat organisasional-formal. Patronase model ini lebih sesuai dengan prinsip partai modern dan dapat memiliki fungsi strategis sebagai mesin pembangunan institusi partai.

4. Dampak Faksionalisme

Faksionalisme yang berkepanjangan jelas menyebabkan semakin melemahnya konsolidasi organisasi[33]. Para elit parpol saling melemahkan dan tidak saling mendukung. Implikasi kegagalan mengelola faksionalisme ini, misalnya, faksi yang terpinggirkan cenderung membentuk parpol baru atau para politikus berpindah ke parpol lain sambil mencaci maki parpol yang pernah dihinggapi. Parpol gagal menjalankan fungsinya sebagai intermediasi politik akan berimbas terhadap institusi demokrasi (eksekutif-legislatif-yudikatif) dan perilaku elit politik (pejabat publik) yang perekrutannya melibatkan parpol. Karena itu, problem di lembaga legislatif, eksekutif, bahkan yudikatif sejatinya sangat mungkin merupakan imbas dari parpol yang gagal. Jika paprol gagal, maka tentu saja upaya maksimalisasi pelayanan publik menjadi ilusi alias tak pernah terwujud.

[33]Bima Arya Sugiarto, "Beyond Formal Politics: Party Factionalism and Leadership In Post-Authoritarian Indonesia" (Thesis tidak diterbitkan, Department Of Political And Social Change Research School Of Pacific And Asian Studies The Australian National University, 2006) 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id